

Judul : Industri tekstil rusak: DPR dukung stop penjualan thrifting
Tanggal : Minggu, 23 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Industri Tekstil Rusak

DPR Dukung Stop Penjualan Thrifting

KALANGAN Senayan mendukung langkah Pemerintah melarang penjualan pakaian bekas impor alias thrifting ilegal. Langkah ini akan mendorong pertumbuhan industri tekstil dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja baru.

Anggota Komisi VI DPR Ahmad Labib mengatakan, serbuan barang impor bekas selama ini berdampak besar pada industri tekstil dalam negeri. "Juga merugikan fiskal negara," ujar Labib dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2025).

Namun, Labib meminta Pemerintah memberikan solusi kepada pedagang barang bekas karena jualan mereka dilarang. Karena usaha mereka harus tetap berjalan sebagai sumber pendapatan sehari-hari. "Jadi mereka bisa ditawarkan dengan produk dalam negeri," saran Anggota Fraksi Golkar ini.

Senada, anggota Komisi VI DPR Imas Aan Ubudiyah menyambut positif rencana Pemerintah mengganti penjualan pakai-

an bekas impor dengan produk lokal. Langkah ini dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat daya saing produk nasional dan membuka peluang ekspor.

"Barang thrifting adalah produk ilegal yang merugikan dan mengancam keberlangsungan industri dalam negeri," ujar Imas dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2025). "Langkah Pemerintah juga akan membantu memperkuat daya saing produk lokal," sambungnya.

Imas menjelaskan, serbuan produk thrifting yang menawarkan harga lebih murah telah menyulitkan produk lokal untuk bersaing di pasar domestik. Peningkatan penjualan produk lokal akan menimbulkan efek pengganda yang besar bagi perekonomian nasional.

Mulai dari bergairahnya industri manufaktur, meningkatnya permintaan bahan baku, hingga meluasnya lapangan pe-



Ahmad Labib

kerjaan. "Semua pihak diharapkan mendukung kebijakan ini," imbau anggota Fraksi PKB ini.

Selain itu, Imas menekankan pentingnya pengawasan ketat dari Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) selama masa transisi. Pastikan proses transisi ini berjalan tepat dan tidak dimanfaatkan oknum tertentu. "Jika ada

pelanggaran, harus diberi sanksi tegas," tegas legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini.

Pemerintah, tambah dia, harus memastikan adanya manfaat ekonomi bagi para pedagang dari peralihan ini. Kebijakan ini jangan hanya sekadar mengganti, tetapi juga harus disertai pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas produk. "Sehingga, kesejahteraan pedagang naik, dan produk lokal kita semakin kuat, bahkan punya peluang besar menembus pasar ekspor," ujarnya.

Sementara, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya membersihkan pasar Indonesia dari bisnis impor baju bekas ilegal. "Sudah jelas itu barang ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak atau nggak bayar pajak," tegas Purbaya di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Purbaya juga menolak argumen pembayaran pajak dapat melegalkan barang yang secara hukum dilarang. Penegasan ini

disampaikan menanggapi wacana legalisasi thrifting yang diusung para pedagang. "Kalau saya menagih pajak dari ganja, apakah barang itu jadi legal? Kan kira-kira gitu padanannya," tegas dia dengan analogi yang gamblang.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menambahkan, pihaknya sudah melakukan konsolidasi terhadap 1.300 brand lokal untuk mengganti pakaian impor bekas ilegal di pasaran. "Dalam waktu dekat kita segera bicarakan dengan seluruh pedagang baju bekas untuk mendorong substitusinya (penggantinya)," kata Maman di Jakarta, Jumat (22/11/2025).

Kementerian UMKM, kata Maman, juga berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengakselerasi substitusi produk impor pakaian bekas ilegal tersebut agar segera digantikan dengan brand UMKM lokal. ■ TIF